

Resolusi untuk memulihkan demokrasi dan menghormati hak-hak fundamental di Myanmar

(19 Juni 2021)

Konferensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional,

Pertemuan pada Sidang ke-109,

Mengingat komitmen lama ILO untuk menghormati hak-hak fundamental, demokrasi, dan supremasi hukum di Myanmar,

Menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penyingkiran Pemerintah sipil oleh kudeta militer yang dilakukan di Myanmar, deklarasi keadaan darurat dan perkembangan lainnya sejak 1 Februari 2021, termasuk penangkapan sewenang-wenang, penahanan, intimidasi, ancaman, dan tindakan kekerasan terhadap anggota serikat buruh dan lainnya yang secara damai menggunakan hak mereka atas kebebasan berespresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, serta penghancuran pabrik dan tempat kerja lainnya,

Menyesalkan kematian lebih dari delapan ratus orang hingga hari ini, termasuk para anggota serikat buruh, yang menggunakan hak mereka atas kebebasan berkumpul secara damai dalam memprotes kudeta militer,

Sangat prihatin bahwa polisi dan militer menggrebek rumah dan kantor serikat buruh, mengusik dan mengancam anggota serikat dan keluarganya, dan menempatkan para pemimpin serikat buruh dalam tahanan dan dalam daftar buronan sebagai pembalasan atas partisipasi mereka dalam pemogokan dan demonstrasi damai yang menuntut pemulihan tatanan demokrasi dan pemerintahan sipil dan kelanjutan transisi menuju demokrasi, serta diakhirinya pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak-hak buruh,

Menyadari risiko serius bagi kapasitas pengusaha, setelah kudeta militer pada 1 Februari 2021, untuk menyediakan pekerjaan yang layak dan keberlanjutan perusahaan mereka,

Mengingat bahwa kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat penting untuk pelaksanaan kebebasan berserikat dan bahwa semua Negara Anggota memiliki kewajiban untuk menerapkan sepenuhnya, dalam hukum dan dalam praktik, Konvensi yang telah mereka ratifikasi secara sukarela,

Memperhatikan dengan keprihatinan mendalam penggunaan kerja paksa oleh militer, termasuk di daerah konflik yang sedang berlangsung dan terhadap etnis minoritas, seperti Rohingya, terutama ketika konflik meningkat di seluruh negeri,

Memperhatikan juga bahwa situasi kemanusiaan yang memburuk di seluruh negeri, terutama di daerah perbatasan, dan kurangnya akses kemanusiaan menimbulkan ancaman bagi pelaksanaan hak-hak buruh dan hak asasi manusia secara efektif,

Mengekspresikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya risiko pemindahan paksa dan kurangnya akses ke pekerjaan dan peluang mata pencaharian bagi orang-orang yang termasuk dalam agama dan etnis minoritas, termasuk Rohingya,

Mengekspresikan dukungan penuh bagi buruh, serikat buruh, dan masyarakat umum, termasuk komunitas bisnis, yang terlibat dalam protes damai dan aksi untuk menuntut kembalinya demokrasi,

1. Menyerukan kepada Myanmar untuk:

- a) memulihkan tatanan demokrasi dan pemerintahan sipil di Myanmar, dan - begitu pemerintah yang terpilih secara demokratis telah dipulihkan - untuk segera mengubah Undang-Undang Personil Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan Undang-Undang Organisasi Perburuhan, sesuai dengan Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87) yang diratifikasi oleh Myanmar;
- b) menghentikan semua serangan, ancaman, dan intimidasi oleh militer terhadap buruh, pengusaha dan organisasi mereka masing-masing, dan masyarakat umum, termasuk dalam hubungannya dengan partisipasi damai mereka dalam kegiatan protes, serta terhadap agama dan etnis minoritas seperti Rohingya dan segera dan tanpa syarat membebaskan dari penahanan dan mencabut tuntutan apa pun terhadap mereka yang ditahan secara sewenang-wenang;
- c) mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pemulihan prinsip-prinsip dan hak-hak fundamental di tempat kerja;
- d) menghormati Konvensi No. 87 dan memastikan bahwa buruh dan pengusaha dapat menggunakan hak kebebasan berserikat mereka dalam iklim kebebasan dan keamanan, bebas dari kekerasan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

- e) mencabut segala tindakan atau perintah yang dikeluarkan atau tindakan tambahan yang diberlakukan, setelah penyingkiran pemerintah sipil yang membatasi kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul secara damai, dan tindakan yang membatasi kebebasan buruh, pengusaha, dan organisasi mereka masing-masing untuk melakukan kegiatan mereka secara bebas dan tanpa ancaman intimidasi atau bahaya;
 - f) memastikan akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan untuk mendukung semua orang yang membutuhkan.
2. Merekomendasikan agar Negara-Negara Anggota mendukung pemulihan demokrasi di Myanmar termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau badan-badan multilateral lainnya, pengelompokan dan dialog regional, dan keterlibatan bilateral, sebagaimana mestinya, mengakui peran penting organisasi buruh dan pengusaha dalam memajukan pemulihan cepat tatanan demokrasi dan pemerintahan sipil serta kelanjutan transisi menuju demokrasi di Myanmar.
 3. Meminta agar pelaksanaan Resolusi ini, bersama dengan keputusan Sidang ke-341 (Maret 2021) Badan Pengatur, ditindaklanjuti oleh Badan Pengatur untuk pertimbangan lebih lanjut yang mungkin dimilikinya, termasuk dalam kaitannya dengan Sidang ke-110 Konferensi Perburuhan Internasional.